

BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS

PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

Kota Surabaya dalam konteks pembangunan nasional sesuai dengan PP No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional PKN disamping 14 Kota yang lainnya yaitu Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Bandung, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Manado, Ujung Padang, Biak.

Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah berusaha untuk mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Sehubungan dengan itu berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Pemerintah telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005. Tahun 2005 adalah tahun terakhir dari pelaksanaan RENSTRA tersebut. Pada Bab ini sengaja penulis hadirkan sebagian Rencana Strategi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (tahun 2006-2010) tentunya yang berkaitan dengan lingkungan.

A. Kondisi Dan Permadalahan Lingkungan

Terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur, yaitu: kependudukan dan pembangunan, degradasi hutan dan lahan, pencemaran sumber air, pendemaran tanah dan udara, pengelolaan limbah B3, masalah lingkungan perkotaan. Kependudukan dan Pembangunan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu kondisi penduduk dan perilakunya sangat berpengaruh terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam RPJM disebutkan bahwa jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2004 tercatat 36.668.407 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 787 per KM2 dan dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,07% per tahun. Jumlah penduduk dan kebutuhannya yang semakin meningkat, dan tidak memperdulikan kelestarian fungsi lingkungan hidup ternyata menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya akan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Jawa Timur.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan disebabkan karena pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas dan secara Cuma-

Cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap dianggap sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak pernah habis. Disamping itu masih ada pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan dan keserakahan.

Sehubungan dengan itu masih diperlukan peningkatan kesadaran penduduk tentang pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup disamping pengendalian jumlah penduduk.

Pemenuhan kebutuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraannya memerlukan peningkatan pembangunan. Paradigm pembangunan yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan eksploitasi sumber daya pembangunan dilakukan secara berlebihan. Hal itu berakibat semakin merosotnya kapasitas dan kualitas sumber daya alam dan menurunnya fungsi lingkungan hidup. Kondisi seperti itu apabila dibiarkan berlanjut terus, pada suatu saat akan menurunkan tingkat kesejahteraan dan pada akhirnya akan mengancam kehidupan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut telah ditetapkan kebijaksanaan Nasional pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Namun pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ternyata masih belum berhasil meredam degradasi fungsi lingkungan hidup yang terjadi, karena belum konsisten dalam penerapannya.

Kondisi dan permasalahan penduduk serta pembangunan yang dihadapi di masa mendatang mengharuskan dilaksanakannya pengendalian dampak lingkungan hidup secara bersungguh-sungguh di Jawa Timur yang menjadi peluang bagi BAPEDAL untuk meningkatkan peranannya.

B. Degrasi hutan dan Lahan

Luas kawasan hutan di Profinsi Jawa Timur 1.363.719 Ha, (28%) dari luas daratan) menurut fungsinya terdiri dari :

- Hutan Lindung	= 315.503,3 Ha
- Hutan Produksi	= 815.058,6 Ha
- Hutan Konservasi	
Cagar Alam	= 10.957,9 Ha
Suaka Margasatwa	= 18.009,6 Ha
Taman Wisata	= 297,5 Ha

Terjadinya bencana alam berupa banjir, tanah longsor di beberapa daerah merupakan indikasi bahwa kondisi fisik hutan mengalami degradasi yang cukup berat.

Degradasi hutan tampak dari adanya lahan kritis dalam kawasan hutan sebagai berikut :

- Hutan Lindung dan	
Hutan Produksi	= 160.000 Ha

- Hutan Konservasi = 40.000 Ha

Selain itu terdapat juga kawasan hutan Produksi yang terletak pada kemiringan lereng 40% - 60% yang seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung seluas 251.618 Ha. Terdapat pula adanya konversi hutan menjadi lahan non hutan (permukiman dan perkebunan) seluas 9.000 Ha.

Disamping itu terdapat lahan kritis diluar kawasan hutan seluas 665.000 Ha, sehingga lahan kritis dan lahan rusak mencapai sekitar 865.000 Ha.

Dari seluruh kawasan hutan yang ada hanya Tanam Hutan Raya R. Soeryo (27.868,3 Ha) yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan kondisi kerusakan yang cukup parah (kritis 14.000 Ha). Sejak tahun 2003 dilakukan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) dan Gerakan Sejuta Pohon (GSP). BAPEDAL telah ikut berperan dengan memfasilitasi penghijauan lahan kritis terutama di daerah penyangga. Hasil kegiatan yang telah dilakukan masih memerlukan pemeliharaan dan pengembangan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sasaran GNRHL diarahkan kepada 3 (tiga) DAS prioritas yang meliputi 38 Kabupaten/Kota, dengan target areal sebagai berikut :

- Tahun 2003 : 58.422 Ha
- Tahun 2004 : 60.000 Ha
- Tahun 2005 : 65.000 Ha
- Tahun 2006 : 70.000 Ha

- Tahun 2007 : 75.000 Ha

Pembinaan dan pemantauan di kawasan penyangga khususnya di sekitar TAHURA R. Soeraja perlu ditingkatkan. Pembinaan perlu diarahkan kepada aparat/ pejabat di Kabupaten/ Kota serta kelompok masyarakat peduli lingkungan.

Pencegahan dan pengurangan degradasi hutan dan lahan yang telah dilakukan selama lebih dari 2 (dua) dasawarsa melalui reboisasi, penghijauan dan berbagai teknik konversi lahan, ternyata belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada.

Degradasi hutan dan lahan tersebut disebabkan antara lain :

1. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan.
2. Tumbuhnya industri perkayuan di Jawa Timur memerlukan bahan baku yang jauh melebihi produksi kayu. Akibatnya eksploitasi hasil hutan kayu hanya cenderung mengejar keuntungan jangka pendek sebesar-besarnya.
3. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap illegal logging (pembalakan liar) dan terbang berlebih (over cutting) mengakibatkan perencanaan kehutanan tidak dapat berjalan efektif atau bahkan tidak berjalan.
4. Tekanan penduduk dan pembangunan juga mengakibatkan saratnya masalah dalam penguasaan lahan dalam kawasan hutan, hal

tersebut diperparah dengan praktek pengelolaan hutan yang tidak lestari dan terhambatnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

5. Rendahnya kapasitas pengelola hutan karena terbatasnya sumber daya manusia, pendanaan, sarana-prasarana, kelembagaan, serta insentif bagi pengelola kehutanan, bila dibandingkan dengan cakupan luas kawasan hutan yang harus dikelola. Disisi yang lain partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah.
6. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non kayu jasa lingkungan hutan, antara lain wisata, air minum kemasan, objek penelitian dan lain-lain.
7. Pemanfaatan lahan dengan kelerengan yang curam untuk pertanian tanaman semusim tanpa memperdulikan aspek konservasi.
8. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masih memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Hubungan Pemerintahan, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan hutan.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

1. Penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air, sehingga banjir, erosi, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan di musim kemarau menjadi masalah laten yang terjadi setiap tahun.
2. Rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas (keanekaragaman hayati) dan berubahnya iklim.

3. Kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku.
4. Rusaknya kawasan konservasi sebagai sumber plasma nutfah dan perlindungan daerah bawahan. Sebagai contoh luas lahan kritis di Taman Hutan Raya R. Soeryo seluas 14.000 Ha di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas telah mengakibatkan matinya 60% mata air Kali Brantas.
5. Menurunnya produktifitas lahan.
6. Meningkatnya laju degradasi hutan dan lahan dari 0,01% pertahun menjadi 0,02% pertahun.

Kondisi dan permasalahan tersebut mendorong perlu dilakukannya pengendalian dampak kerusakan hutan dan lahan secara terpadu dan berkesinambungan. Pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan hutan di kawasan hutan adalah tanggung jawab pengelola hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan lahan diluar kawasan hutan merupakan tanggung jawab Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota beserta masyarakat dan dunia usaha.

Rehabilitasi hutan dan lahan tidak akan dapat berhasil apabila tidak didukung oleh masyarakat oleh karena itu diperlukan pembinaan masyarakat yang beragam disekitar kawasan hutan (dareah penangguh). Mengingat kewenangan

dan kemampuan BAPEDA yang terbatas kerjasama tata kabupaten/kota, instansi terkait dan masyarakat mutlak diperlukan.

C. Pencemaran Sumber Air

Mengingat kewenangan propinsi dan besarnya peranan kali brantas (beserta 40 anak sungainya) dalam mendukung penduduk di Jawa Timur, perhatian terhadap sumber air sampai saat ini sebagian besar masih difokuskan di DPS (Daerah Pengaliran Sungai) atau DAS (Daerah Aliran Sungai) kali brantas.

Panjang sungan DPS kali brantas 320 km melintasi beberapa kabupaten/kota, dengan potensi air 12 miliar m³/tahun. Luas DPS 12.000 km² (25% luas daratan Jawa Timur), populasi penduduk 15,2 juta jiwa (43% jumlah Penduduk Jawa Timur) dengan curah hujan rata-rata 2000mm/tahun.

Untuk memberikan gambaran tentang kondisi kualitas sumber air dapat disampaikan pemantauan yang dilakukan oleh BAPEDAL bekerjasama dngan Perum Jasa Tirta I. Pemantauan tersebut dilakukan baik secara manual maupun otomatis.

Pemantauan secara manual dilakukan di sepanjang kalibrantas dan waduk diDPS kali brantas dengan frekuensi pemantauan 2mingguan, bulanan, dan 3 bulan di 51. Pemantauan.

Pemantaun kualitas air secara otomatis menggunakan 14 tasiun telemetri pemantaun kualitas air atau WQMS (water quality monitoring station) dan tambahan pemantauan hidrologi/ kuantitas air di 14 stasiun.

Dari hasil pemantaun yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa gambaran kualitas air kali brantas sebagai berikut :

1. Kualitas air dibagian hulu pada triwulan I tahun 2005 (jembatan pendem)
 - COD 15,5 mg/l
 - BOD 4,2 mg/lDiposisi hilir (Bendungan Lengkung Baru)
 - COD 23mg/l
 - BOD 4,9mg/lDikali Surabaya (gambe tambangan)
 - COD 26,5mg/l
 - BOD 9,6mg/l

Pada tahun 2004 tercatat bahwa nilai rata-rata BOD kali brantas mencapai 18,83 mg/l, sedangkan nilai COD mencapai 39,59 mg/l padahal standart baku mutu yang ditetapkan kali brantas untuk COD 10mg/l dan BOD 6mg/l.

Hasil evaluasi yang dilalkukan menunjukkan bahwa :

- Peningkatan BOD pada tahun 2004 dan tahun sebelumnya untuk ruas Kali Surabaya (dari karangpilang ngagel jagir).

- Makin kehilir kualitas air sungai semakin menurun dan di Kali Surabaya (terutama di Kali tengah) kualitas airnya benar-benar sangat memprihatinkan.
 - Terjadi kenaikan kandungan Phospat (PO_4) dibagian hilir (Kali Surabaya). Kandungan parameter nitrat (NO_3) cenderung menurun dan masih memenuhi baku mutu dibagian hilir. Namun dibagian hulu cukup tinggi yang menjafi salah satu penyebab terjadinya eutrofikasi di Waduk Sutami.
 - Kandungan logam berat, parameter Mercury (Hg), timbal (Pb) dan Cyanida di semua lokasi pemantauan pada tahun 2004 masih memenuhi baku mutu.
2. Pada bulan juni 2001 muncul gejala autrofikasi di Waduk Sutami dan menjadi normal kembali setelah musim hujan. Pada bulan februari 2002 – april 2002 terjadi lagi eutrofikasi (algae blooming) di Waduk Sutami, air waduk berwarna hijau kecoklatan beserta gumpalan limbah yang mengapung dan berbau busuk. Selanjutnya pada bulan september 2002 banyak ikan yang mati disertai bau anyir yang menyengat. Kejadian ini terulang pada bulan juli – agustus 2003 dan bulan agustus 2004. Hasil studi fakultas MIPA Universitas Brawijaya tahun 2004 menyatakan bahwa Waduk Sutami termasuk eutrofik dan sudah tercemari bahan organik, beberapa jenis mikroalgae dan zooplankton secara nyata mempunyai kelimpahan yang dipengaruhi oleh kandungan Nitrat, fosfat, bahan organik (COD) dan padatan tersuspensi (TSS)

3. Pada bulan september 2004 ada keluhan dari PDAM Kota Surabaya tentang terdapatnya busa pada unit-unit treatmentnya yang mengolah air baku Kali Surabaya. Pada bulan september 2004 juga terdapat keluhan tentang keruhnya air Kali Surabaya pada bulan februari 2005 ada keluhan dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo tentang terjadinya peningkatan kadar logam manganese (Mn) sehingga produksi air yang dihasilkan terasa agak asin dan berbau kurang sedap.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber air (DPS Kali Brantas) terutama dibagian hilir mengalami penurunan sehingga belum sesuai dengan peruntukannya

Hal tersebut disebabkan karena :

1. Banyaknya kegiatan penduduk di bidang, industri, bisnis dan rumah tangga yang membuang limbah ke sungai dan meningkatnya sedimentasi karena rusaknya kondisi daerah tangkapan air di daerah hulu.
2. Penduduk tinggal di daerah datara sungai sebagian besar tidak memiliki sarana pengolahan limbah domestik memadai.
3. Banyak industri yang belum memiliki sarana pengolahan limbah dan daging industri yang sudah memiliki pengolahan limbah sebagian belum mematuhi ketentuan dalam ijin penbuangan limbah cair.
4. Peningkatan nutrisi Nitrogen (N) dan Phospat (P) yang berlebihan yang berasal

dari residu pupuk kegiatan pertanian/perkebunan., sehingga mengakibatkan terjadinya kondisi eutrofikasi di waduk Sutami.

5. Terbatasnya sumber dana untuk mengendalikan pencemaran.
6. Masih kurangnya peranan masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus pencemaran.
7. Pengelolaan limbah belum dilaksan secara terpadu dan sistematis.
8. Masih lemahnya penegakkan hukum dalam penanggulangan kasus-kasus pencemaran, penerapan sanksinya dirasakan masih relatif terlalu ringan (kurang adil).

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sudah dilakukan, namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hasil belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan masih memerlukan peningkatan dan pengembangan. Sehubungan dengan itu penilaian kinerja perusahaan dalam pengolaan lingkungan (PROPER) beserta tindak lanjutnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup merupakan peluang yang dimanfaatkan. Mengingat kewenangan dan kemampuan BAPEDAL yang terbatas, kerjasama dengan Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat mutlak diperlukan.

D. Pencemaran Tanah dan Udara

Pemantauan terhadap pencemaran tanah masih belum dilakukan secara intensif, pemantauan masih difokuskan pada pencemaran akibat limbah padat sampah perkotaan dan limbah B3. Sedangkan pemantauan kualitas udara dilakukan di Kota Surabaya.

Hasil pemantauan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas udara ambient di kota besar seperti Surabaya seringkali dibawah baku mutu, pencemaran udara yang terjadi berasal dari sumber bergerak (transportasi) dan tidak bergerak (industri). Pencemaran udara tertinggi di kota Surabaya terjadi di musim kemarau berasal dari partikel debu (PM10) disamping itu terdapat polutan berupa SO₂, CO, NO₂ dan O₃.
2. Bahan bakar minyak yang ada masih mengandung timbal (Pb) sehingga menghasilkan polutan yang mencemari udara dan berbahaya untuk kesehatan.
3. Pengelolaan limbah B3 yang berasal dari rumah sakit, industri dan pemukiman belum ada tempat pembuangan limbah B3 di Jawa Timur. Pada saat ini hanya ada satu fasilitas pengolahan limbah B3 yang dikelola swasta di Cibinong. Tingginya biaya, rumitnya pengelolaan limbah B3, serta rendahnya pemahaman masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah B3, terhadap lingkungan. Hasil survey potensi limbah B3 di Jawa Timur yang dilakukan oleh DAMES & MOORE pada tahun 1997 menunjukkan bahwa dari 41 industri yang

disurvei diperkirakan menghasilkan limbah B3 sebanyak 35.000 ton/tahun dan yang dikirim ke PPLI-B3 Bogor sebanyak 7.000 ton/tahun. Pembangunan PPLI-B3 di Cerme Gresik yang sudah direncanakan sejak tahun 1989 dengan ditunjuknya konsorium konsultan CH2M HILL, PT. Vidcodata dan ITS, sampai saat ini belum dimulai pembangunannya.

4. Pembangunan pupuk dan pestisida secara berlebihan untuk meningkatkan produksi pertanian / perkebunan menimbulkan residu yang mencemari tanah dan air. Hal tersebut tampak dari eutrofikasi yang di waduk dan, sungai yang menurunnya/ punahnya populasi jenis-jenis binatang tertentu yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati.
5. Sistem pengolahan sampah ditempat pembuangan akhir (TPA) mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah akibat genangan leacheate sistem open dumping yang mengancam kesehatan masyarakat.

Hal lain yang perlu di perhatikan adalah belum dilaksanakannya adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) akan dapat memacu penurunan kualitas udara. Fenomena kekeringan (El Nino) dan banjir (La Nina) yang terjadi secara luas sejak tahun 1990-an membuktikan adanya perubahan iklim global. Dibanding 150 tahun yang lalu, suhu rata-rata permukaan bumi kini meningkat 0.6 C, akibat emisi gas rumah kaca seperti CO₂, CH₄ dan Nox dari negara-negara industri maju. Sampai tahun 2100 mendatang suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan akan naik lagi sebesar 1,4 – 5, 8 C. Keseimbangan

lingungan global terganggu, glacier dan lapisan es kutub mencair, permukaan laut naik, dan iklim global berubah. Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah tropis, pasti terkena dampaknya. Oleh karena itu adaptasi oleh perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, permukiman dan tata ruang. Di lain pihak, isu perubahan iklim memberi ruang tersendiri bagi Indonesia, yang telah meratifikasi Kyoto Protocol, dimana negara-negara industri maju dapat menurunkan. Emisinya melalui kompensasi berupa investasi proyek CDM (Clean Development Mechanism) di negara berkembang seperti Indonesia.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran tanah dan udara memiliki potensi yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup pada masa yang akan datang. Pengaturan mengenai sistem pengelolaan dan pengendalian gas buang (emisi), baik industri maupun transportasi diperlukan sebagai upaya peningkatan perbaikan kualitas udara. Disamping itu pengelolaan limbah B3 dan limbah padat perkotaan memerlukan penanganan yang lebih intensif. Sehubungan dengan itu terlaksananya pembangunan PPLI-B3 di Cerme Gresik akan menjadi peluang dalam rangka menangani limbah B3.

E. Kerusakan /Pencemaran Pesisir dan Pantai

Perhatikan terhadap kerusakan pesisir dan pantai masih dirasa kurang optimal. Meningkatnya pembangunan di wilayah pesisir dan pantai (terutama di pantai utara Jawa Timur) telah

menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan pantai. Hasil pemantauan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa :

1. Hutan mangrove dalam kawasan hutan seluas 21.195,64 Ha, 50% dalam kondisi rusak. Hutan mangrove diluar kawasan hutan seluas 6.730 Ha, seluas 4.117 Ha dalam kondisi rusak.

Luas hutan mangrove yang ideal di Jawa Timur 45.000 Ha, saat ini mencapai luas 37.237 Ha, namun dalam kondisi rusak 11.124 Ha.

Pada tahun 2004 secara keseluruhan luas ekosistem mangrove yang rusak 16.366 Ha dan tanah kosong yang potential untuk ditanami mangrove seluas 5.242 Ha.

2. Pencemaran laut semakin meningkat dan pendangkalan muara sungai yang sangat cepat.
3. Terjadi kerusakan terumbu karang dan biota laut, pada tahun 2004 kerusakan yang terjadi sangat bervariasi antr 30% - 80% dan tersebar di situbondo, P. Sabuten, P. Gili Raja, P. Raas dan P. Mamburit.

Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Penerapan ketentuan tata ruang dan kawasan lindung untuk wilayah pesisir dan pantai belum konsisten.
2. Pencemaran air sungai dari darat yang mengalir ke laut dan limbah yang dibuang ke laut, baik dari industri maupun dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak.
3. Tingginya laju sedimentasi dari daerah hulu sungai.
4. Meluasnya reklamasi dan tambak yang berwawasan lingkungan.
5. Penambangan terumbu karang yang tidak terkendali.

6. Penggunaan bahan peledak dan racun untuk mencari ikan.
7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem pesisir dan pantai masih rendah.

Akibatnya timbul dampak negatif antara lain sebagai berikut :

1. Semakin menurunnya hasil penangkapan ikan para nelayan.
2. Semakin meningkatnya abrasi pantai di wilayah pantai utara (Tuban, Gresik, Probolinggo, Lamongan dan Madura).
3. Meningkatnya industri air laut dan rusaknya biota laut terutama di wilayah pantai utara (pantura) yang mengancam keanekaragaman hayati.

Dengan adanya kenyataan tersebut pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan pantai masih perlu memperoleh perhatian dan penanganan yang sebaik-baiknya.

Sampai saat ini BAPEDAL telah melakukan pemberian bantuan bibit mangrove sebanyak 1.218.250 batang (tahun 2002-2005).

F. Lingkungan Perkotaan

Lingkungan hidup perkotaan akan menghadapi ancaman yang serius di masa mendatang akibat bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk karena urbanisasi, meningkatnya kebutuhan lahan dan terbatasnya ketersediaan lahan, meningkatnya kesulitan penyediaan air bersih,

meningkatnya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak serta kebisingan dan produksi sampah yang terus meningkat. Berkembangnya permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.

Berkaitan dengan kualitas udara, senyawa yang perlu memperoleh perhatian adalah partikulat (PM10), CO dan Nox. Pencemaran udara perkotaan utamanya disebabkan oleh gas buang kendaraan dan industri, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Hal ini diperburuk oleh kondisi atmosfer global yang menurun karena rusaknya lapisan ozon di stratosfer akibat akumulasi senyawa kimia seperti chlorofluorocarbons (CFCs), hydrochlorofluorocarbons (HCF-Cs), carbontetrachloride, methyl chloroform, dan methyl bromide yang biasa digunakan sebagai refrigerant mesin penyejuk udara, lemari es, spray, dan foam. Senyawa-senyawa tersebut merupakan bahan perusak ozon (BPO) atau ODS (ozone depleting substance). Indonesia terikat Montreal Protocol dan Kyoto Protocol untuk mengurangi penggunaan BPO tersebut, namun masih sulit dilaksanakan karena bahan pengantinya masih langka dan harganya relatif mahal. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 Indonesia telah berhasil mengurangi penggunaan BPO 6.562 metrik ton. Pada akhir tahun 2007 impor CFCs akan di hentikan.

1. Pengolahan sampah dengan open dumping mengakibatkan umur TPA menjadi terbatas, sedangkan penyediaan lahan untuk lokasi TPA baru sangat sulit.
2. Belum tersedia fasilitas limbah cair domestik, sehingga limbah cair domestik masih banyak yang di buang

kesaluran-saluran tanpa diolah terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya pencemaran.

3. Kepadatan penduduk kota akibat urbanisasi disertai rendahnya kesadaran akan pentingnya kebersihan, mengakibatkan sungai digunakan untuk tempat pembuangan sampah dan menimbulkan pencemaran sungai.
4. Perkembangan transportasi dan industri dengan menggunakan bahan bakar minyak yang mengandung Pb akan menimbulkan meningkatnya pencemaran udara.
5. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH) atau hutan kota di wilayah perkotaan akibat pemanfaatan lahan yang terlalu mengedepankan keuntungan ekonomi.

Dalam menangani sampah perkotaan sudah mulai berkembang pengelolaan sampah oleh masyarakat dalam lingkungan RT/RW dengan teknologi yang sederhana. Upaya tersebut perlu memperoleh dukungan pemerintah propinsi. Atau kabupaten/kota untuk di kembangkan. Penghijauan kota dan taman kota untuk menambah ruang terbuka hijau sudah memperoleh perhatian yang cukup besar. Pencemaran udara misalnya di Surabaya sudah mulai memperoleh perhatian antara lain melalui pemantauan dan penyusunan peraturan daerah.

Penilaian Kinerja Lingkungan Perkotaan yang dilaksanakan merupakan peluang dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara bertahap.

G. Peluang dan Tantangan

Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengendalian dampak lingkungan antara lain:

1. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang harus dilaksanakan seluruh sektor.
2. Keterikatan Indonesia dengan Montreal Protocol Dan Kyoto Protocol serta AFTA, APEC dan WTO.
3. Makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup di Jawa Timur agar dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin.
4. Adanya kompensasi berupa investasi proyek CDM (Clean Development Mechanism) dari negara industri maju untuk negara berkembang.
5. GNRLH (Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan) dan Gerakan Sejuta Pohon (GSP) serta perlunya pemeliharaan serta pengembangan hasil kegiatan GNRHL dan GPS secara terus menerus dan berkesinambungan.
6. Penilaian kinerja perusahaan (PROPER)
7. Penilaian kinerja lingkungan perkotaan (Adipura)

Tantangan / Kendala

Kendala / tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Jawa Timur yang cukup besar dan akan terus meningkat disertai meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun untuk memenuhi

kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mengeksploitasi sumber daya alam.

2. Tingkat kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan masih perlu di tingkatkan.
3. Kepadatan penduduk di kota-kota besar dan belum memadainya sistem dan fasilitas pengolahan limbah domestik (rumah tangga) di perkotaan terutama di wilayah bantaran sungai.
4. Masih belum konsistennya penerapan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Masih terdapat lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan dan seluas 865.000 Ha yang perlu di rehabilitasi, di samping masih perlunya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan dan lahan. Sehubungan dengan itu terdapat kendala antara lain :
 - a. Kurangnya kesadaran dan partisipasi rakyat.
 - b. pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan masih belum optimal.
 - c. tekanan penduduk dalam rangka menguasai kawasan hutan.
 - d. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait.
 - e. Masih lemahnya penegakkan hokum.
 - f. Adanya praktek usaha pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi.
6. Kualitas air pada sumber air (DAS Kali Brantas) terutama di bagian hilir masih belum memenuhi standar buku mutu yang telah ditetapkan atau masih belum sesuai dengan peruntukannya, akibat masih terjadinya pencemaran. Terjadinya Eutrofikasi di waduk-waduk

dan sedimentasi disepanjang aliran sungai sampai ke muara karena adanya kerusakan vegetasi penutup tanah di daerah tangkapan air. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- a. Masih banyak industry yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah.
 - b. Masih banyak IPAL industry yang belum difungsikan dengan baik.
 - c. Belum tersedia sarana pengolahan limbah domestic yang memadai.
 - d. Terbatasnya kemampuan dalam pengawasan.
 - e. Partisipasi masyarakat dan pengawasan masyarakat masih kurang.
 - f. Masih lemahnya penegakkan hokum.
7. Potensi produksi limbah B3 yang cukup besar yang belum dapat dikelola dengan baik, kendala yang dijumpai antara lain:
- a. Pembuangan limbah B3 Ke Cibunong biayanya terlalu mahal.
 - b. Belum tersedia fasilitas pembuangan limbah B3 di Jawa Timur.
8. Tingginya produksi sampah di lingkungan perkotaan terutama di kota-kota besar dan pengolahan sampah dengan system open dumping yang dapat menimbulkan pencemaran tanah dan air. Terdapat kendala dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar antara lain:
- a. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

- b. Terbatasnya lahan untuk lokasi TPA dengan menggunakan system open dumping yang umur operasinya relative singkat.
9. Meningkatkan pencemaran udara diperkotaan terutama di kota-kota besar, dalam pengendalian pencemaran udara dijumpai beberapa kendala antara lain:
- a. Penggunaan BBM yang mengandung Pb.
 - b. Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor.
 - c. Terbatasnya peralatan.
 - d. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau (hutan kota)
10. Terdapat ekosistem mangrove yang rusak seluas 11.124 Ha dan tanah kosong yang potensial untuk ditanami mangrove seluas 5.242 Ha. Dalam rangka rehabilitasi ekosistem mangrove dijumpai beberapa kendala antara lain:
- a. Adanya reklamasi pantai, pembukaan tambak dan pemanfaatan pesisir/pantai lainnya yang kurang memperhatikan Rencana Tata Ruang.
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakatan terhadap pentingnya pelestarian hutan mangrove.

Peran strategis kota Surabaya tersebut di atas menuntut adanya peningkatannya pelayanan diberbagai sector pembangunan baik local, regional maupun nasional. Untuk maksud tersebut maka perlu dirumuskan arah kebijakan pembangunan berdasarkan isu-isu strategis.